

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan pada Puskesmas Oepoi kota Kupang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi persediaan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Oepoi dimulai dari sistem perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan alat kesehatan.
2. Sistem pengadaan pada Puskesmas oepoi dilakukan melalui dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan melalui aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK). Sistem pengadaan yang dilakukan melalui dana kapitasi JKN dimulai dari kegiatan pengajuan, persetujuan, pembelian dan penerimaan alat kesehatan. Pada sistem pengadaan melalui ASPAK, pihak Puskesmas hanya melakukan pengajuan alat kesehatan secara terkomputerisasi yang ditujukan kepada dinas kesehatan kota dan provinsi serta kementerian kesehatan. Pengadaan alat kesehatan yang diajukan melalui aplikasi akan diadakan langsung oleh kementerian kesehatan melalui oleh dinas kesehatan kota.
3. Dari sistem akuntansi persediaan yang dijalankan oleh Puskesmas Oepoi masih ditemukan beberapa kekurangan atau kelemahan. Permasalahan yang dihadapi antara lain permasalahan pada sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta permasalahan pada sistem akuntansi persediaan alat kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Oepoi.

4. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka peneliti melihat bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan alat kesehatan pada Puskesmas Oepoi sudah sesuai, hal ini terlihat pada beberapa poin yang dilakukan Puskesmas Oepoi sudah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Persediaan, dengan pengecualian pada bagian gudang yang belum sesuai karena pencatatan yang dilakukan masih menggabungkan antara peralatan dan perlengkapan yang dibuktikan dengan kartu inventaris barang yang dimiliki oleh Puskesmas oepoi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran bagi Puskesmas Oepoi yaitu sebagai berikut :

1. Puskesmas Oepoi harus memiliki sumber daya manusia yang memadai khususnya dibidang akuntansi agar sistem pencatatan lebih dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak pada sisi operasional maupun sisi akuntansi
2. Pembagian tugas seharusnya dilakukan secara merata sehingga tidak terjadinya over multi job.
3. Pada Puskesmas Oepoi belum adanya pencatatan persediaan yang sesuai kaidah yang berlaku dan Puskesmas Oepoi masih menggabungkan setiap jenis persediaan tanpa adanya pengklasifikasian persediaan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaiannya. Untuk itu dibutuhkannya sistem akuntansi persediaan pada Puskemas Oepoi yang diharapkan dapat

memberikan arahan dalam pencatatan persediaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi.

4. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat penyimpanan alat kesehatan, sebaiknya Puskesmas menyediakan fasilitas berupa gudang untuk menyimpan alat kesehatan guna menjaga ketersediaan dan pemeliharaan alat kesehatan yang ada di Puskesmas Oepoi Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adikoesoema, R.Soemita, Achmad, Bachtiar. 2012. Sistem-sistem Akunting. Bandung: Sinar Baru
- Baridwan, Zaki. 2001. Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta:BPFE
- Buku II Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. 2014. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP
- Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.
- Modul 1 Konsep Dan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Dalam Negeri
- Modul 3 Pengantar Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 2014. Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Ratmono dwi dan Sholihin Mahfud.2015.Akuntansi Keuangan Daerah.cetakan Pertama. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Akuntansi. Erlangga: Jakarta
- Fees, Warren, Reeve.2008.Pengantar Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta
- Jr., Walter T., et al. 2012. Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Erlangga

James M. Reeve. 2013. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat

S R, Soemarso.2009.Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.

Fees, Warren, Reeve.2008.Pengantar Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta

Baridwan, Zaki. 2007.Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: YKPN.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.